

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN

(Studi Kasus N0.1067/Pdt.G/2010/PA.Sda)

SKRIPSI



Oleh :

ABU BAKAR  
NPM. 0771010034

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2011

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA  
WARIS MELALUI PERDAMAIAN

(Studi Kasus N0.1067/Pdt.G/2010/PA.Sda)

Disusun Oleh:

ABU BAKAR  
NPM. 0771010034

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

Subani, S.H., M.Si  
NIP/NPT. 1951055041983031001

Fauzul Aliwarman, SH.,M.Hum  
NIP/NPT. 38202070221

Mengetahui  
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH, MM  
NIP/NPT. 19620621991031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abu Bakar

Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 27 Januari 1989

NPM : 0771010034

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Banyu Urip Kidul II/1A Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui

Surabaya, 15 November 2011

A.n Ketua Program Studi

Penulis

SESPROGDI

Fauzul Aliwarman, SH.,M.Hum  
NIP/NPT. 38202070221

Abu Bakar  
NPM.0771010034

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan nama Allah yang maha dan maha penyayang

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walau dengan pengorbanan yang cukup besar. Skripsi ini diambil dengan judul: "Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo."

Adapun penulisan skripsi ini yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo dimaksudkan untuk memenuhi tugas akademis di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur guna memperoleh gelar Sarjana hukum.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, dukungan, dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

3. Bapak Drs.Ec.Gendut Sukarno, MS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, Shi., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kedua orang tua tercinta, Papa, Mama, Mamak, Bunda, adik-adik, kakak-kakak, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doanya selama ini.
9. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan sependidikan, serta seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa ibarat ”Tiada Gading yang Tak Retak“, maka penulis dengan segala kekurangannya akan merasa senang apabila terdapat kritik maupun saran yang ditujukan guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga

skripsi ini dapat menjadi awal yang berharga dan bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu terutama dalam bidang Ilmu Hukum serta tegaknya hukum di Indonesia.

Serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya terutama kalangan hukum dan adik-adik kelas yang ada di fakultas hukum UPN “veteran” Jatim.

Surabaya, 31 Oktober 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Revisi .....	iv
Halaman Pernyataan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
Abstrak .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4

1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5. Kajian Pustaka .....	5
1.5.1. Tinjauan Umum Mengenai Waris .....	5
1). Pengertian Hukum Waris .....	5
2). Macam-Macam Hukum Waris .....	5
3). Pengertian Pewaris .....	6
4). Pengertian Ahli Waris .....	6
5). Orang Yang Berhak Menerima Waris .....	6
6). Besarnya Pembagian Waris .....	7
7). Sistem Pembagian Waris Dalam Hukum Adat.....	9
8). Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris .....	11
9). Penyebab Terhalangnya Menjadi Ahli Waris .....	11
10). Asas-Asas kewarisan Islam .....	12
1.5.2. Tinjauan Umum Mengenai Perdamaian .....	14
1). Pengertian Perdamaian .....	14
2). Bentuk Persetujuan Perdamaian .....	16
1.5.3. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Pengadilan Agama.....	18
1). Macam-Macam Putusan Hakim .....	18
2). Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan .....	20



1.5.4. Tinjauan Umum Mengenai Sita Jaminan .....	20
1.6. metode Penelitian .....	23
1.6.1. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian .....	23
1.6.2. Sumber Data .....	24
1.6.3. Pembatasan Masalah .....	25
1.6.4. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data .....	25
1.6.5. Metode Analisis Data .....	26
1.6.6. Sistematika Penulisan .....	26
1.7. Lokasi Penelitian .....	27
 <b>BAB II. PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI</b>	
<b>PERDAMAIAN.....</b>	<b>28</b>
2.1 Duduk Perkara .....	28
2.2.1. Alasan-Alasan Penggugat Menggajukan Gugatan Harta Waris.....	29
2.2.2 Hal Yang Diminta Oleh Para Penggugat .....	31
2.2 Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris.....	33

2.3. Analisis .....	37
 BAB III. IMPLEMENTASI PUTUSAN PERDAMAIAN YANG	
 DIBERIKAN OLEH PENGADILAN AGAMA.....	
3.1 Pelaksanaan Perdamaian.....	43
3.2 Analisis.....	45
 BAB IV. PENUTUP.....	
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
 DAFTAR PUSTAKA.....	
 LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Tanah Waris Yang Dijadikan Jalan Arteri .....	38
Gambar 2 : Susunan Ahli Waris .....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan pencabutan surat gugatan Pengadilan Agama Sidoarjo

Lampiran 2 : Surat gugatan waris oleh tergugat

Lampiran 3 : Surat pernyataan pencabutan perkara

Lampiran 4 : Copy kartu PERADI kuasa hukum penggugat

Lampiran 5 : Surat pernyataan laporan hasil mediasi

Lampiran 6 : Penetapan penunjukan mediator

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Abu Bakar  
NPM : 0771010034  
Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 27 Januari 1989  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA  
WARIS MELALUI PERDAMAIAAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa diskriptif analisis serta menggunakan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai acuan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perdamaian di luar persidangan karena tercapai kesepakatan dalam pembagian harta waris, sehingga gugatan dicabut oleh penggugat dengan persetujuan tergugat. Setelah persidangan tergugat memberikan sebagian harta waris kepada tergugat sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dan akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang final dan tidak dapat diajukan gugatan kembali.

Kata kunci : Waris, perdamaian

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan.

Penegakan hukum khususnya hukum perdata materiil, maka diperlukan hukum acara perdata. hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain

Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui litigasi (pengadilan). Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh

hakim itu sendiri, apabila dalam pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak pengadilan agama, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan. Seperti yang tercantum dalam pasal 130 HIR (Herziene Inlandse Reglement) tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:

1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.
3. Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.
4. Jika dalam usaha untuk mencapai perdamaian tersebut diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka diikuti ketentuan-ketentuan dalam pasal berikut:

Hakim dapat berperan secara aktif pada saat ini sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah

kepada hakim di persidangan hasil perdamaianya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai.

Sayangnya usaha perdamaian tidak selalu berhasil pada tahap mediasi, hal ini dikarenakan adanya rasa tidak adil yang dialami oleh pihak yang berperkara, sehingga mereka memilih untuk tidak berhenti pada tahap mediasi dan meneruskan perkara mereka pada tahap litigasi. Perkara tersebut dengan terpaksa dilanjutkan dengan proses litigasi dan pemilihan hakim baru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Proses litigasi yang dilakukan oleh pihak yang berperkara tidak selamanya diakhiri dengan kemenangan atau kekalahan. Ada beberapa perkara yang pada tahapan mediasi gagal untuk mencapai perdamaian, namun pada tahapan litigasi para pihak yang berperkara mencapai perdamaian. Salah satu contoh sengketa tersebut terjadi pada sengketa harta waris, dimana pada awal tahapan mediasi perkara tersebut gagal untuk mencapai perdamaian namun pada akhirnya sengketa tersebut mampu berkhir dengan dicapainya perdamaian pada tahap litigasi

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan diberi judul tentang: “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo”



### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta waris?
2. Bagaimana implementasi dari putusan perdamaian yang diberikan oleh pengadilan agama?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana bentuk proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta waris.
2. Mengetahui implementasi dari putusan perdamaian yang diberikan oleh pengadilan agama.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat praktis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana bentuk perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

#### 2. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat menambah memberikan sumbangan penambahan ilmu tentang implementasi dari putusan terhadap perkara sengketa harta waris .

## 1.5.Kajian Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum Mengenai Waris

#### 1) Pengertian Hukum waris

Mengenai pengertian hukum waris, banyak dari para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris. Berikut ini adalah pendapat beberapa para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris.

Vollmar berpendapat bahwa “Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya” (Vollmar, 1989:373). Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.<sup>1</sup>

Pitlo berpendapat bahwa “ hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga” (Pitlo, 1986:1).<sup>2</sup>

Sedangkan sesuai dengan Pasal 171(a) kompilasi hukum islam, menyebutkan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

---

<sup>1</sup>Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta, Sinar Grafika Offset,, 2008, Cet ke- 5, hal.137

<sup>2</sup>Ibid h.138

## 2) Macam-macam hukum waris

Hukum waris di Indonesia terdapat dua macam waris yang dikenal oleh masyarakat, yaitu:

1. Hukum waris tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
2. Hukum waris adat adalah hukum waris yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat.<sup>3</sup>

## 3) Pengertian pewaris

Pengertian pewaris sesuai dengan Pasal 171(b) kompilasi hukum islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

## 4) Pengertian ahli waris

Sesuai dengan Pasal 171(c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

## 5) Orang yang berhak menerima waris.

Kelompok-kelompok ahli waris sesuai dengan Pasal 174 kompilasi hukum islam terdiri dari:

---

<sup>3</sup>Ibid, h.138

# 1. Menurut hubungan darah

(1). Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

(2). Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

# 2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

# 6) Besarnya pembagian waris menurut kompilasi hukum islam.

Sesuai dengan kompilasi hukum islam di Indonesia, dalam bab III mengenai pembahagian besarnya waris,

## 1. Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

## 2. Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

### 3. Pasal 178

(1). Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2). Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

### 4. Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

### 5. Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

### 6. Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

### 7. Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

#### 8. Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya

#### 9. Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

#### 10. Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan

penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

## 7) Sistem Pewarisan dalam hukum adat.

Pembagian pewarisan juga diatur dalam hukum adat. Hukum adat yang berlaku untuk setiap adat yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia.

### 1. Sistem keturunan

Hal ini disebabkan dikarenakan di Indonesia terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan sehingga sistem keturunannya juga berbeda. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- (a) SISTEM PATRILINIAL, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Batak, Nias, Lampung, Buru, Irian, Nusa Tenggara)
- (b) SISTEM MATRILINIAL, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria didalam waris (Minang Kabau, enggono, Timor)
- (c) SISTEM PARENTAL atau BILATERAL, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu). Dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).<sup>4</sup>

### 2. Sistem Pewarisan Individual.

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sisitem kekerabatannya Parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa, Batak dan Lampung.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT.Citra Aditya bakti,, 2003, Cet ke- 7, hal.23

<sup>5</sup>Ibid, h.24

### 3. Sistem Pewarisan Kolektip

Sistem pewarisa kolektip ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Dalam pembagian harta itu menggunakan musyawarah dan mufakat dengan dipimpin oleh kepala kerabat. Sistem kolektip ini berlaku di daerah Minang Kabau, Batak atau di Minahasa dalam sifat yang tidak terbatas.<sup>6</sup>

### 4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem Pewarisan Mayorat adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pimpinan rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.<sup>7</sup>

### 8) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris.

Pasal 175 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa ahli waris mempunyai kewajiban terhadap pewaris, kewajiban tersebut yaitu:

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

---

<sup>6</sup>Ibid, h.26

<sup>3</sup>Ibid, h.28



#### 9) Penyebab terhalangnya menjadi ahli waris.

Sesuai dengan Pasal 173 kompilasi hukum islam, yang menyebabkan seseorang terhalang menjadi ahli waris, adalah apabila dengan putusannya Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

#### 10) Asas-asas kewarisan Islam

Sistem kewarisan hukum Islam mempunyai empat asas yang menjadi dasar pembagian hukum islam. Menurut Muhammad Daud Ali, keempat asas tersebut antara lain:

##### a) Asas ijabari

Asas ijabari yang terdapat dalam hukum kewarisan hukum islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris. Unsur keharusan (ijbari = compulsory) dalam hukum kewarisan Islam terutama terlihat dari segi: ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta waris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Asas ijabari hukum kewarisan Islam dapat pula dilihat dari beberapa segilain yaitu:

- (1). Dari segi peralihan harta yang sudah pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.

- (2). Dari jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- (3). Dari mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan, yang sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.<sup>8</sup>

#### b) Asas Bilateral

Asas bilateral berarti bahwa seseorang yang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat Al-Nisa (4) ayat 7, 11, 12 dan 176. Di dalam ayat 7 surat tersebut ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia berhak mendapat warisan dalam kewarisan bilateral. secara terinci asas itu disebutkan juga dalam ayat-ayat lain diatas.<sup>9</sup>

#### c) Asas Individual

Asas individual ini adalah asas yang menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tertentu, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab dalam pelaksanaan sistem kewarisan kolektif itu, mungkin terdapat harta anak yatim yang dikhawatirkan akan termakan, sedang memakan harta anak yatim itu merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Cet ke- 6, hal.141

<sup>9</sup>Ibid

<sup>10</sup>Ibid, h.142

d) Asas keadilan yang berimbang

Asas yang terakhir adalah asas keadilan yang berimbang yaitu asas yang mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan hukum Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan anak dan istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istri mampu atau tidak. Terhadap kerabat lain, tanggung jawab seorang anak laki-laki hanyalah tambahan saja, sunnah hukumnya, kalau ia mau dan mampu melaksanakannya berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh seorang laki-laki dan seorang anak perempuan dari harta peninggalan, manfaatnya akan sama mereka rasakan.<sup>11</sup>

### 1.5.2. Tinjauan umum mengenai perdamaian

#### 1) Pengertian perdamaian

Pengertian perdamaian menurut KUH Perdata Pasal 1851 menyebutkan, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.

---

<sup>3</sup>Ibid, h.143

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 7 PERMA No 1 tahun 2008 tentang Mediasi menyebutkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

2) Syarat formil putusan pengadilan.

1. Persetujuan kedua belah pihak.

Kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama menyetujui dengan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan mesti murni datang dari kedua belah pihak. Artinya, persetujuan itu bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim. Dalam hal ini berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

- (1). Adanya kata sepakat secara suka rela.
- (2). Kedua pihak cakap membuat persetujuan.
- (3). Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu.
- (4). Berdasarkan alasan yang diperbolehkan.

2. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa

Syarat yang kedua, putusan perdamaian benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Putusan perdamaian yang tidak tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak, maka putusan

tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Agar perdamaian sah dan mengikat, persetujuan harus tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Itu sebabnya Pasal 1851 KUH Perdata menjelaskan rumusan akta penyerahan atau penahanan suatu barang yang mengakhiri sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa perkara yang tergantung di pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara di pengadilan.

### 3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada.

Putusan perdamaian tidak hanya dilahirkan dari sengketa perkara yang sudah diperiksa atau yang masih tergantung di pengadilan, namun putusan pengadilan juga dapat dilahirkan dari suatu persengkataan perdata yang belum diajukan di pengadilan.

### 4. Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis.

Syarat formil yang paling pokok bagi persetujuan perdamaian adalah bentuk tertulis. Persetujuan perdamaian tidak sah jika dibuat secara lisan, sahnyapun persetujuan perdamaian jika dibuat secara tertulis. Syarat ini bersifat imperative.

### 3) Bentuk persetujuan perdamaian

Mengenai bentuk persetujuan perdamaian terdapat dua macam bentuk persetujuan perdamaian yang dapat dilakukan oleh orang yang bersengketa. Bentuk persetujuan perdamaian tersebut adalah berbentuk putusan perdamaian dan berbentuk akta perdamaian.

a. Berbentuk putusan perdamaian

Suatu persetujuan perdamaian disebut berbentuk putusan perdamaian apabila terhadap persetujuan perdamaian dimintakan putusan perdamaian. Para pihak boleh meminta putusan perdamaian pada saat permulaan pemeriksaan, pertengahan pemeriksaan atau pada saat akhir pemeriksaan. Tata cara pembuatan putusan perdamaian dapat diterangkan sebagai berikut:

1) Para pihak lebih dulu membuat sendiri akta persetujuan

Jika para pihak menghendaki perkara diakhiri dengan putusan perdamaian, para pihak merumuskan persetujuan dalam suatu akta. Persetujuan yang dirumuskan dalam fakta, tidak boleh menyimpang dari pokok sengketa (pokok perkara). Namun, sekalipun perumusan isi persetujuan berdasarkan inisiatif dan kehendak para pihak, hal itu tidak mengurangi peran pengadilan (hakim) untuk membantu mereka. Pengadilan dapat member petunjuk dan dapat berperan sebagai pendamping pada saat kedua belah pihak merumuskan isi persetujuan.<sup>12</sup>

2) Para pihak menandatangani akta persetujuan perdamaian.

Setelah rumusan persetujuan perdamaian ditulis dalam akta, para pihak harus membubuhkan tanda tangan mereka dalam akta. Akta persetujuan perdamaian yang telah ditandatangani tadilah yang mereka ajukan pada pengadilan (hakim) untuk diputuskan menjadi putusan

---

<sup>6</sup>Yahya Harahap., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, Sinar Grafika,, 2008, Cet ke-2, hal. 299

pengadilan. Sekiranya salah satu pihak tidak mau menandatangani akta persetujuan perdamaian, terhadap akta yang seperti itu tidak dapat dimintakan putusan perdamaian ke pengadilan. Seandainya salah satu pihak tidak mau menandatangani akta persetujuan perdamaian. Tindakan yang tepat dilakukan pengadilan dalam hal adanya keengganan salah satu pihak menandatangani akta persetujuan perdamaian adalah melanjutkan perkara yang bersangkutan.

- 3) Pengadilan (Hakim) menjatuhkan putusan dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar): “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi perdamaian”.

Apabila para pihak yang berperkara mengajukan permintaan kepada hakim yang memeriksa perkara supaya kepada mereka dijatuhkan putusan perdamaian, dan ternyata akta persetujuan perdamaian sudah ditandatangani para pihak, fungsi hakim dalam hal ini adalah:

- (a). Mengambil alih sepenuhnya isi persetujuan atau melampirkan akta persetujuan dalam putusan.
- (b). Tidak boleh menambah atau mengurangi atau mencoret satu kata pun isi persetujuan perdamaian, mesti diterima secara bulat dan utuh.
- (c). Pada diktum (amar) putusan, hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian (menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian)<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid h.300

b. Berbentuk akta perdamaian

Suatu persetujuan disebut akta perdamaian, jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan (hakim). Apa yang disengkatan oleh para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Persetujuan perdamaian ini dibuat oleh para pihak tidak dikukuhkan oleh pengadilan.<sup>14</sup>

1.5.3. Tinjauan umum mengenai putusan pengadilan agama

1) Macam-macam putusan hakim.

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara mempunyai banyak macam. Dalam putusan hakim ada dua golongan putusan yaitu

a). Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/ belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

b). Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

---

<sup>14</sup>Ibid h.301



Menurut Retno Wulan Sutantio, berdasarkan sifatnya ada tiga macam putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim, yaitu:

a). Putusan declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata

b). Putusan constitutif

Putusan constitutive adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

c). Putusan condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi tentang penghukuman.<sup>15</sup>

Namun pada umumnya dalam suatu putusan hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan lain perkataan merupakan penggabungan dari putusan declaratoir dan putusan constitutif atau penggabungan antara putusan declaratoir dengan putusan condemnatoir dan sebagainya.

2) Hal-hal yang dimuat dalam putusan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 H.I.R, putusan hakim harus mengatur hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata, Jakarta, CV. Mandar Maju,, 2005, Cet ke- 10,

- a) Ringkasan yang jelas tentang gugatan dan jawaban.
- b) Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.
- c) Putusan pengadilan mengenai pokok perkara
- d) Putusan tentang besarnya biaya perkara
- e) Putusan memuat tentang keterangan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak pada waktu putusan dijatuhkan.
- f) Apabila putusan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang pasti, maka peraturan tersebut harus disebutkan.

#### 1.5.4. Tinjauan umum mengenai sita jaminan

Terkadang pada kenyataannya suatu barang yang disengketakan baik bergerak maupun tidak bergerak dapat digelapkan atau dilarikan oleh tergugat. Untuk menghindari hal tersebut maka penggugat meskipun dalam proses persidangan dapat memohonkan kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan.

##### 1) Sita jaminan conservatoir (sita jaminan harta milik tergugat)

diatur dalam pasal 227 H.I.R yang berbunyi:

- a) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu;

kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.

- b) Debitur harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu.
- c) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang peraturan yang harus dituruti serta akibat yang berhubungan dengan hal itu, berlaku 197, 198 dan 199
- d) Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dijalankan dengan cara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan; jika ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.
- e) Permintaan tentang pencabutan penyitaan selalu boleh diajukan, jika diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup.

Inti sari dari ketentuan pasal 227 (1) H.I.R tersebut diatas adalah:

- a) Harus ada sangka yang beralasan, bahwa bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya
- b) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan barang orang yang terkena sita, maksudnya bukan milik penggugat.
- c) Permohonan hendaknya diajukan kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- d) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis.
- e) Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.<sup>16</sup>

2) Sita jaminan revindicatoir diatur dalam pasal 227 H.I.R yang berbunyi:

- a) Pemilik barang bergerak, boleh meminta dengan surat atau dengan ban kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa di tempat diam atau tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita.

---

<sup>16</sup>Ibid, h.99

- b) Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan jelas dalam permintaan itu
- c) Jika permintaan itu diluluskan, maka penyitaan akan dilakukan menurut surat perintah ketua. Tentang orang yang harus melakukan penyitaan itu dan tentang persyaratan yang harus dipenuhi, berlaku juga pasal 197
- d) Panitera pengadilan harus segera memberitahukan penyitaan itu kepada orang yang mengajukan permintaan, dan menerangkan kepadanya, bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan meneguhkan gugatannya.
- e) Orang yang memegang barang yang disita itu harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu.
- f) Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dan pengambilan keputusan dijalankan dengan cara biasa. (TR. 130 dst., 139 dst., 155 dst., 163 dst., 178 dst.)
- g) Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan, lalu diperintahkan supaya barang yang disita itu diserahkan kepada si penggugat; sedang kalau gugatan itu ditolak, harus diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.

Dari bunyi pasal diatas, maka untuk dapat dilakukan sita jaminan revindicatoir itu adalah:

1. Harus berupa barang bergerak.
2. Barang bergerak tersebut merupakan barang milik penggugat yang berada ditangan penggugat.
3. Permintaannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
4. Permintaan mana dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
5. Barang tersebut harus diterangkan secara seksama atau secara terperinci.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ibid, h.1104

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian dan tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hal ini mengandung pengertian penyusun mencoba menganalisa permasalahan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni hukum waris dan hukum acara perdata.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya yang terjadi. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa harta waris di pengadilan melalui mediasi.

### 1.6.2. Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara, yaitu :

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji adalah kompilasi hukum islam buku II tentang hukum kewarisan,

HIR (Kitab undang-undang hukum acara perdata) dan kitab undang-undang hukum perdata.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, serta pengumpulan data melalui wawancara dengan hakim pengadilan agama yang memutuskan perkara sengketa harta waris.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai perangkat dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari :

- (a). Kamus Hukum.
- (b). Kamus bahasa Indonesia Balai Pustaka.

### 1.6.3. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, maka peneliti membatasi dengan membahas permasalahan tentang “ Tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :1067/Pdt.G/200/PA.Sda. “

#### 1.6.4. Metode pengumpulan data dan pengolahan data

Dalam pengumpulan bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya dibahas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian. Serta dengan mengajukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara sengketa harta waris.

#### 1.6.5. Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis, artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo, kemudian akan dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dibahas dan dianalisa untuk kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### 1.6.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam empat bab pokok bahasan utama. Untuk memperoleh pembahasan atas permasalahan secara menyeluruh dan terperinci, berikut ini akan dijelaskan pembahasan dalam tiap babnya.

Bab I adalah bab pendahuluan. Di sini diuraikan tentang latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong timbulnya permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian yang digunakan. Sehingga melalui isi dari bab I akan tampak alasan penyusun memilih obyek penulisan tentang “Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo”.

Bab II Penyusun akan membahas tentang bagaimana bentuk proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta waris.

Bab III akan membahas tentang permasalahan yang kedua. pembahasannya yaitu mengenai bagaimana implementasi dari putusan hakim Pengadilan Agama

Bab IV merupakan bab penutup dimana penyusun akan memberikan beberapa kesimpulan atas semua jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dalam bab II dan bab III. Selain itu penyusun akan memberikan saran yang bermanfaat bagi masyarakat yang sedang menangani sengketa dalam pembagian harta waris.

#### 1.7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Pengadilan Sidoarjo, dimana Pengadilan Agama Sidoarjo telah memutuskan mengenai sengketa harta waris.